

**AKTIVITAS PERHUMAS INDONESIA DALAM
MENINGKATKAN PROFESIONALISME ANGGOTANYA
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**

Yessica Tiurma Lestari

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

Yanti Setianti

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

yanti.setianti@unpad.ac.id

Centurion Chandratama Priyatna

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

centurion.priyatna@unpad.ac.id 08562121843

ABSTRAK

Indonesia telah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak akhir tahun 2015. Dampak pemberlakuan MEA tentu dirasakan oleh profesi *Public Relations* (PR) di Indonesia. Kualitas profesionalisme sumber daya manusia PR menjadi aspek utama untuk dapat bersaing di era pasar persaingan terbuka ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari para narasumber yang merupakan PR profesional di Indonesia, PR di Indonesia saat ini masih memiliki keterbatasan, diantaranya adalah; bahasa, belum menjadi salah satu profesi yang tergabung dalam *Mutual Recognition Agreement* (MRA), kurangnya mentalitas untuk *go international*, dsb. Peran untuk meningkatkan profesionalisme PR di Indonesia secara aktif dilakukan oleh salah satu organisasi profesi PR di Indonesia, yaitu Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aktivitas PERHUMAS dalam meningkatkan profesionalisme anggotanya yang terdiri atas aspek *skill* atau kemampuan, kesadaran kode etik, tanggung jawab profesi, integritas pribadi, jiwa pengabdian, otonomisasi organisasi profesional, dan penerimaan keanggotaan PERHUMAS dalam menghadapi MEA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PERHUMAS Indonesia telah melakukan perannya sesuai dengan fungsinya sebagai organisasi profesi dengan menjalankan sejumlah aktivitas untuk meningkatkan profesionalisme anggotanya yang terdiri dari aspek *skill* atau kemampuan, kesadaran kode etik, tanggung jawab profesi, integritas pribadi, jiwa pengabdian, otonomisasi organisasi profesional, dan penerimaan keanggotaan PERHUMAS dalam menghadapi era MEA, walaupun dampaknya belum dirasakan secara maksimal dikarenakan kebutuhan industri PR yang beragam.

Kata kunci: Profesionalisme PR, Public Relations, PERHUMAS Indonesia, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

***PERHUMAS INDONESIA'S ACTIVITIES TO ENHANCE THE
PROFESSIONALISM OF ITS MEMBERS IN FACING ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY (AEC)***

ABSTRACT

Indonesia has entered the ASEAN Economic Community (AEC) since the end of 2015. The impact of the implementation of AEC is certainly felt by Public Relations (PR) officers in Indonesia. The quality of PR professionalism becomes the key aspects to compete in this free trade area. Based on the data obtained from the key informants who are known as the PR professional in Indonesia, they said that PR in Indonesia still have many boundaries; one of them are the lack of English skill, has not incorporated with the Mutual Recognition Agreement (MRA), lack of 'go international' mentality, etc. Therefore, the improvement of PR professionalism quality is actively carried out by one of the PR professional organization in Indonesia, which is Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS). The purpose of this research is to determine the activity of PERHUMAS Indonesia to enhance the professionalism of its members, which consists of skill or competence, code of ethics, responsibility and integrity, self-dedication, professional organization autonomy, and membership recruitment in facing ASEAN Economic Community (AEC). The method used in this research was descriptive method with qualitative data. The output of this research shows that PERHUMAS Indonesia has done its role as a professional organization of PR – PERHUMAS Indonesia has conducted specific programs to enhance its member's professionalism in several aspects, which are skill or competence, professional organization autonomy, and membership recruitment in facing ASEAN Economic Community, although the impacts haven't been felt due to the different needs in each of the PR industries.

Key Words: *Professionalism of PR, Public Relations, PERHUMAS Indonesia, ASEAN Economic Community (AEC)*

PENDAHULUAN

Era globalisasi dewasa ini menjadi kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap negara. Globalisasi merupakan kecenderungan umum terintegrasinya kehidupan masyarakat domestik/lokal ke dalam komunitas global di berbagai bidang. Era ini membuat dunia kini seolah tanpa sekat.

Tentu di era globalisasi seperti ini, banyak negara yang sepakat untuk menjalin kerja sama. Hal ini pula yang terjadi dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003, seluruh kepala negara yang tergabung dalam ASEAN menyepakati pembentukan komunitas ASEAN dalam berbagai bidang yang dikenal dengan Bali Concord II yang memuat 3 pilar untuk mencapai ASEAN Vision tahun 2020 yakni Ekonomi, Sosial budaya, dan Politik Keamanan. Perwujudan pilar Ekonomi tersebut adalah dengan dibentuknya ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pada KTT ASEAN ke-12 tahun 2007, Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sepakat mempercepat tewujudnya AEC atau MEA dari tahun 2020 menjadi tahun 2015, melalui “*Declaration on the Acceleration*

of the Establishment of an ASEAN Community by 2015.” (ASEAN, n.d.)

Masyarakat Ekonomi ASEAN dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN. Melalui ketentuan tersebut, nantinya perdagangan barang, jasa, modal dan investasi akan bergerak bebas dan lebih mudah, seperti menerapkan penghapusan bea masuk (*Free Trade Area*), seakan tidak ada halangan secara geografis. Hal-hal yang diharapkan dari MEA antara lain: 1) Pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, 2) Kawasan ekonomi yang berdaya saing, 3) Pertumbuhan ekonomi yang merata, 4) Meningkatkan kemampuan untuk berintegrasi dengan perekonomian global. (Kementerian Luar Negeri, 2015)

Indonesia telah memasuki era MEA sejak akhir tahun 2015. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu tombak kesuksesan di era pasar persaingan terbuka ini. Seperti halnya pendapat yang diungkapkan oleh Hanif Dhakiri selaku Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada saat diwawancarai usai diskusi The Indonesia Forum, di Jakarta, Selasa 19 Januari oleh Indonesiasatu.co menyatakan bahwa beberapa persyaratan umum harus dimiliki oleh sebuah negara agar produk, barang dan jasa dapat bersaing diantara negara-negara ASEAN; yakni negara haruslah

mempersiapkan SDM yang terampil, cerdas dan kompetitif. (Sandy Romualdus, 2016).

Luas geografis serta kekayaan alam yang melimpah sangat berpotensi mendukung suksesnya pemberlakuan MEA di Indonesia. Belum lagi, Indonesia memiliki tingkat populasi tertinggi ke-4 di dunia. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai *magnet* ASEAN dikarenakan tingginya angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, pada kenyataannya sampai saat ini sumber daya alam dan manusia, serta infrastruktur yang dimiliki oleh Indonesia masih belum dapat dikelola dengan maksimal untuk menghadapi MEA.

Terbukti berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2014 menyatakan bahwa jumlah angkatan kerja Indonesia per Februari 2014 telah mencapai 125,3 juta orang atau bertambah 1,7 juta dibandingkan Februari 2013; namun jumlah angkatan kerja masih didominasi lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah, yaitu 55,31 juta, lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 21,06 juta, lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) 18,91 juta, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 10,91 juta, lulusan Diploma 3,13 juta, sedangkan lulusan Universitas hanya 8,85%. Berdasarkan hasil data tersebut, dapat disimpulkan

bahwa jumlah “*skilled labour*” atau tenaga kerja terdidik di Indonesia masih rendah. (Komalasari, 2015)

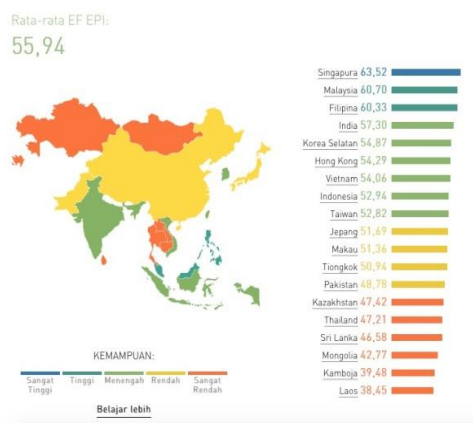
Institute of Management Development (IMD) yang merupakan lembaga pendidikan bisnis terkemuka di Swiss juga melaporkan hasil penelitiannya yang berjudul *IMD World Talent Report 2015*. Penelitian ini berbasis survei yang menghasilkan peringkat tenaga kerja berbakat dan terampil di dunia pada tahun 2015. Didalam laporan tersebut dinyatakan bahwa peringkat Indonesia turun 16 peringkat dari peringkat ke-25 pada tahun 2014, menjadi peringkat ke-41 pada tahun 2015. Posisi Indonesia berada jauh dibawah posisi negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, bahkan Thailand. Posisi Indonesia juga hanya sedikit lebih baik dari Filipina.

Selain itu, hasil riset yang diperoleh berdasarkan *The Global Competitiveness Report 2013/2014* yang dibuat oleh *World Economic Forum* (WEF), juga memperlihatkan kondisi infrastruktur Indonesia yang menempati peringkat ke-82 dari 148 negara atau berada pada peringkat ke-5 diantara Negara-negara inti ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur Indonesia kerap masih tertinggal. (Chairil, 2014).

Aktivitas Perhumas Indonesia Dalam Meningkatkan Profesionalisme Anggotanya Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

No	Country	Rank	Score
1	Singapore	2	5,61
2	Malaysia	24	5,03
3	Brunei Darussalam	26	4,95
4	Thailand	37	4,54
5	Indonesia	38	4,54
6	Philippines	59	4,29
7	Vietnam	70	4,18
8	Cambodia	88	4,01
9	Timor-Leste	138	3,25
10	Myanmar	139	3,23
Jumlah Negara = 148			

Gambar 1. Data Kondisi Infrastruktur Indonesia 2013-2014



Gambar 1.1. Grafik Peringkat

Kemampuan Bahasa Inggris di Asia Sumber: EF English Proficiency Index 2015 (www.ef.co.id)

Berkaca pada data-data diatas, tenaga kerja di Indonesia dirasa masih perlu untuk terus meningkatkan kualitasnya. Dampak pemberlakuan MEA turut dirasakan oleh profesi *Public Relations* (PR) di Indonesia. Kualitas profesionalisme PR menjadi aspek utama untuk dapat bersaing di pasar persaingan

terbuka ini. Profesionalisme yang dimaksudkan disini ialah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan atau keahlian (*skill*), sikap kerja (*attitude*) dan mentalitas (*mentality*) yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Presiden International Public Relations Association (IPRA) pada tahun 2010 yang berkedudukan di London, Elizabeth Goenawan Ananto yang dikenal dengan panggilan Ibu Ega ini berpendapat bahwa Indonesia memiliki banyak sekolah ilmu PR. Hal tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kesadaran atau *awareness* masyarakat Indonesia akan ilmu PR seharusnya lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya (ditinjau dari peringkat tertinggi kuantitas populasi masyarakat Indonesia di ASEAN). Namun sangat disayangkan, banyaknya sekolah ilmu komunikasi di Indonesia ternyata tidak menjamin praktisi PR sudah memiliki profesionalisme atau kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan MEA ini. Kuantitas tidak menjamin kualitas. Selengkapnya Elizabeth Goenawan Ananto menyatakan:

“Siapa tidak siap harus dilihat dari beberapa aspek. Dalam bidang pendidikan, jumlah perguruan tinggi, tenaga

pengajar dan mahasiswa PR Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan negara lain di ASEAN, karena jumlah penduduk yang terbesar di kawasan. Tapi, kuantitas tidak menjamin kualitas.”¹

Selanjutnya, kemampuan bahasa asing terutama bahasa Inggris sebagai bahasa internasional sangat diperlukan bagi praktisi PR untuk menunjang kesuksesan MEA. Melihat kembali kepada hasil survey yang dihasilkan oleh EF English Proficiency Index 2015 di atas, kemampuan bahasa Inggris orang dewasa di Indonesia masih berada di kategori menengah dan masih harus meningkatkan kemampuannya diantara negara-negara anggota ASEAN. Elizabeth Goenawan Ananto juga mengungkapkan bahwa bahasa masih menjadi salah satu *challenges* atau tantangan yang dimiliki oleh praktisi PR di Indonesia, beliau berkata:

“They’re supposed to know how to communicate. We have so many communications university here in Indonesia, yes of course we do have the knowledge, yet there are still many boundaries which becoming the core barrier for us facing the AEC – language barrier. It’s again a skill problem”²

Elizabeth Goenawan Ananto yang juga merupakan Dewan Kehormatan

organisasi profesi, PERHUMAS Indonesia (Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia) periode 2014-2017 mengungkapkan bahwa PR tidak boleh menganggap remeh pemberlakuan MEA. Tantangan MEA seharusnya dimaknai sebagai kekuatan untuk mendorong peningkatan kualitas PR – dalam bidang pendidikan termasuk tenaga pengajarnya, profesi dan praktisinya. Sehingga, ketika pertanyaan, siapkah PR Indonesia menghadapi tantangan MEA? Maka PR harus siap, dengan segala keterbatasan dan kelebihan yang dimiliki – sambil memperbaiki diri di segala lini yang berhubungan dengan PR.³

Perbaikan kualitas PR di Indonesia tersebut tentunya tidak luput dari peranan sebuah organisasi profesi. Era Masyarakat Ekonomi ASEAN seolah juga menuntut peranan organisasi profesi untuk bergerak maju dan cepat dalam memperjuangkan pengembangan dan kemajuan profesi tersebut. Demikian peranan ini secara aktif dilakukan oleh organisasi profesi; Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS Indonesia). PERHUMAS Indonesia merupakan salah satu organisasi profesi para praktisi Humas dan Komunikasi Indonesia yang didirikan pada tanggal 15 Desember 1972. PERHUMAS Indonesia secara resmi telah tercatat di DEPDIAGRI sebagai organisasi

nasional kehumasan di Indonesia dan pada International Public Relation Association (IPRA) yang berkedudukan di London. Tujuan didirikannya organisasi profesi PERHUMAS adalah untuk meningkatkan keterampilan profesional, memperluas dan memperdalam pengetahuan, meningkatkan kontak dan pertukaran pengalaman antara anggota serta berhubungan dengan organisasi serumpun di dalam dan luar negeri. Dilansir bahwa praktisi profesi kehumasan harus memiliki tanggung jawab bersama untuk terus mengeksistensikan fungsi dan peran organisasi PERHUMAS dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kehumasan di Indonesia. (PERHUMAS, 2016)

Melihat fungsi dan tujuan PERHUMAS tersebut, PERHUMAS secara aktif bergerak untuk mengembangkan serta meningkatkan kompetensi PR di Indonesia. Pasalnya, Agung Laksamana selaku Ketua Umum PERHUMAS Indonesia periode 2014-2017 menilai bahwa praktisi PR yang berada di industri swasta akan lebih siap bersaing dibandingkan praktisi PR yang berada di industri pemerintahan. Oleh karena itu, perbaikan kualitas PR juga harus digalakkan sesuai dengan kebutuhan di industrinya masing-masing. Berikut pernyataan beliau:

“In my view, karena need set-nya berbeda-beda, kalau saya kebetulan di industri forestry, ada industri farmasi, ada industri banking, kalau untuk bersaing saya rasa sih mungkin dari teman-teman anggota PERHUMAS yang berbasis MNC (Multinational Company) mungkin lebih ready dibandingkan dengan teman-teman yang National Old Company, ataupun even di government sector sendiri mungkin agak sulit bersaing.”⁴

Berkaca kepada data dan opini dari beberapa PR profesional Indonesia diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa PR masih perlu untuk terus meningkatkan kualitas profesionalismenya. PERHUMAS Indonesia sebagai organisasi profesi PR tertua di Indonesia diharapkan dapat menjadi salah satu jawaban atau solusi bagi para praktisi PR untuk meningkatkan kualitasnya agar siap menghadapi tantangan MEA. Dalam hal ini, PERHUMAS Indonesia mengatakan bahwa sejumlah program telah dilakukannya untuk meningkatkan profesionalisme PR.

Menurut pandangan peneliti, masalah ini dapat dikaji dengan menggunakan konsep Ciri – Ciri *Public Relations Professional* sebagai acuan terhadap kualifikasi profesi PR yang dibutuhkan untuk menghadapi era MEA tersebut. Konsep ini diungkapkan oleh

Rosady Ruslan (2004:52) dalam bukunya, “*Etika Kehumasan Konsepsi & Aplikasi*” mengenai ciri-ciri umum seorang *PR Professional*, yaitu harus memiliki *skill* atau kemampuan, kode etik, tanggung jawab profesi (*responsibility*) dan integritas pribadi (*integrity*), jiwa pengabdian kepada publik, otonomisasi organisasi profesional serta menjadi anggota salah satu organisasi profesi. Berangkat dari latar belakang diatas, peneliti memutuskan untuk mengangkat topik, “Aktivitas PERHUMAS Indonesia dalam Meningkatkan Profesionalisme Anggotanya menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)” sebagai penelitian dengan pendekatan deskriptif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian positivisme, dimana menurut Menurut Pawito (2007: 50-51) dalam bukunya *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, dalam positivisme diakui bahwa operasionalisasi konsep-konsep menjadi langkah penting dalam penelitian ilmiah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, di mana menurut Sugiyono (2005: 21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Dalam menentukan narasumber penelitian, peneliti menggunakan teknik penentuan *key informant* dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2005: 53) teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangannya adalah kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, narasumber yang diwawancarai oleh penulis merupakan orang-orang yang berperan langsung dalam meningkatkan profesionalisme anggotanya pada organisasi PERHUMAS dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), diantaranya:

- a) Ketua Umum PERHUMAS, Agung Laksmmana, M.sc, IAPR
- b) Ketua Bidang Keanggotaan dan Pelatihan PERHUMAS, John Daniel Rembeth, MBA
- c) Anggota Bidang Kerja Sama PERHUMAS, Dian Anggraeni Umar, M.Si, IAPR
- d) *Senior Executive Secretary* PERHUMAS, Anggia Bahana Putri

Terdapat tiga jenis teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini, yaitu wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari enam, yaitu mengolah dan mempersiapkan data, membaca keseluruhan data, menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data, menerapkan proses *coding*, menyajikan kembali dan menginterpretasi.

Validasi dan keabsahan data penelitian ditetapkan menggunakan teknik pemeriksaan dengan kriteria *credibility* (derajat kepercayaan). Teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketekunan/keajegan pengamatan, dan triangulasi. Triangulator dalam penelitian ini adalah Elizabeth Goenawan Ananto, Ph.D, FIPRA selaku Dewan Kehormatan PERHUMAS periode 2014 – 2017.

PEMBAHASAN

Seperti yang kita ketahui, Indonesia telah memasuki era MEA sejak akhir tahun 2015. Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi tombak kesuksesan menghadapi tantangan MEA tersebut. Tentunya, tantangan MEA juga dialami oleh profesi PR di Indonesia. Berkaca kepada hasil pra-riset, ditemukan bahwa SDM di Indonesia secara keseluruhan masih harus terus meningkatkan *skill* atau kemampuannya dalam bersaing dengan Negara-negara ASEAN lainnya. Sama halnya dengan profesi Public Relations

(PR), menurut Elizabeth Goenawan Ananto yang merupakan Dewan Kehormatan PERHUMAS Indonesia dan pernah juga menjabat sebagai President International Public Relations Association (IPRA) di London, berpendapat bahwa kualitas profesionalisme SDM PR di Indonesia masih perlu ditingkatkan.

PR masih memiliki keterbatasan dari segi *skill*, kompetensi dan daya saing agar dapat bersaing di era MEA ini. Humas dituntut untuk dapat menguasai kompetensi yang merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasarkan atas pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), sikap kerja (*attitude*). Rosady Ruslan (2004:52) dalam bukunya “*Etika Kehumasan Konsepsi & Aplikasi*” mengenai ciri-ciri umum seorang *PR Professional*, menjelaskan bahwa salah satu ciri PR profesional adalah memiliki *skill* dan kemampuan. *Skill* atau kemampuan merupakan pengetahuan tinggi yang tidak dimiliki orang umum lainnya, baik itu diperoleh dari hasil pendidikan maupun pelatihan yang diikutinya, ditambah pengalaman selama bertahun-tahun yang telah ditempuhnya sebagai profesional.

Pertama-tama, kita akan melihat bagaimana PERHUMAS memaknai *skill* atau kemampuan. PERHUMAS

memaknai *skill* atau kemampuan sebagai salah satu tombak kesuksesan praktisi PR menghadapi MEA. John Daniel Rembeth selaku Ketua bidang Keanggotaan dan pelatihan PERHUMAS berpendapat *skill* atau kemampuan adalah hal yang paling krusial untuk harus terus ditingkatkan. PR harus terus belajar dan menambah pengetahuan. Ia berkata bahwa kompetensi erat hubungannya dengan praktik kerja PR; sedangkan *skill* lebih mengarah kepada bidang ke-ilmu-an. Beliau menekankan bahwa PR harus terus menambah ilmu dan mengasah kemampuan kerjanya menjadi lebih baik agar siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Sama halnya dengan Dian Anggraeni Umar, sebagai Anggota Bidang Kerja Sama PERHUMAS, ia memaknai *skill* atau kemampuan sebagai kemampuan praktisi humas itu sendiri dalam bersaing yang sesuai dengan standar internasional. Artinya para praktisi humas dalam era ini secara kemampuan harus dapat memenuhi standar internasional, bukan hanya sekedar standar nasional. Namun, jika berkaca kepada pendapat para PR profesional di Indonesia yang menjadi narasumber peneliti dalam kajian ini, mereka menyatakan bahwa tidak semua praktisi PR sudah memiliki *skill* atau kemampuan yang mencapai standar

internasional sampai saat ini. Konsep Rosady Ruslan (2004:52) ini lebih lanjut memaparkan bahwa PR harus meningkatkan *skill* atau kemampuan mereka dari berbagai lini, yaitu bisa saja dari pendidikan yang terus diraihinya, atau pun melalui pelatihan-pelatihan yang diikutinya. Maka dari itu, PERHUMAS sebagai organisasi profesi mempunyai tujuan untuk mengembangkan kompetensi PR di Indonesia khususnya dibidang *skill* dengan melakukan sejumlah aktivitas-aktivitas yang berupa pelatihan, seminar, *gathering*, *workshop*, dsb.

Menurut Rosady Ruslan (2004:51) menjelaskan bahwa seorang profesional adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan purnawaktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan keahlian tinggi. Dalam konteks ini, peneliti menggaris bawahi 'keahlian tinggi' yang disebutkan oleh Rosady Ruslan. Sejalan dengan yang peneliti temukan di lapangan, untuk mencapai 'keahlian tinggi' yang dimaksud oleh Rosady Ruslan tersebut, humas harus terus meningkatkan *skill* atau kemampuannya dalam ber-PR.

Agung Laksamana selaku Ketua PERHUMAS Indonesia periode kepengurusan 2014-2017, mengatakan bahwa peningkatan kualitas PR menuntut kesamaan pandangan dan kerjasama bahu-membahu antara pemerintah, pengusaha,

Aktivitas Perhumas Indonesia Dalam Meningkatkan Profesionalisme Anggotanya Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

dan segenap pemangku kepentingan lain, termasuk di dalamnya organisasi profesi seperti PERHUMAS. Namun, sebelum peneliti masuk lebih jauh dan memaparkan *skill* apa dan bagaimana yang harus dimiliki oleh praktisi PR saat ini; mari melihat kepada kesiapan PR menghadapi MEA saat ini.

Peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa memang benar kondisi PR termasuk di dalamnya anggota PERHUMAS masih harus terus meningkatkan *skill* atau kemampuannya menghadapi MEA. Fakta ini peneliti dapatkan melalui hasil wawancara dengan para narasumber yaitu, BPP PERHUMAS Indonesia, yang berkata bahwa ternyata tidak semua PR telah siap menghadapi era MEA ini. Kenyataan yang terjadi di lapangan berkata bahwa praktisi humas yang bekerja di humas pemerintahan dan di industri lokal cenderung belum siap menghadapi era MEA ini. Hal ini diidentifikasi oleh narasumber melalui observasi yang mereka lakukan – melalui *sharing-sharing* internal yang dilakukan serta banyak keluhan yang diterima oleh pengurus pusat mengenai kondisi mereka saat ini. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti lampirkan analisis SWOT PR berikut ini:

Tabel 4.1 Analisis SWOT PR pada era MEA

Strength	Weakness
<ul style="list-style-type: none"> - Tergabung ke dalam G-20 - <i>Magnet</i> ASEAN - Kuantitas kependudukan tertinggi <i>among</i> ASEAN - Banyaknya sekolah Ilmu Komunikasi atau PR di Indonesia (211 Universitas seluruh Indonesia) (Source: Ban-PT) sehingga tingginya <i>awareness</i> dan <i>knowledge</i> mengenai PR - Menguasai seluk-beluk pasar (Tarah Air sendiri) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman <i>management</i> mengenai profesi PR belum strategis: masih ditempatkan pada fungsi <i>supportive</i> atau administratif - <i>A multi-entry discipline</i> - Sertifikasi masih tahap pengembangan - Profesi PR belum termasuk kedalam <i>Mutual Recognition Agreement</i> (MRA). - Kemampuan bahasa Inggris yang harus terus ditingkatkan (EF English Proficiency Index 2015) - Kurangnya kemampuan dalam melakukan riset & evaluasi (RACE) - In world looking - <i>Sleeping Giant</i> atau kurangnya daya saing PR <ul style="list-style-type: none"> - <i>Lack of confidence</i> untuk bersaing di kancah internasional (Source: Elizabeth Goenawan Ananto)
Opportunities	Threat
<ul style="list-style-type: none"> -- Jalur perdagangan produk atau jasa tidak ada hambatan (<i>borderless</i>) -- Lapangan pekerjaan semakin banyak -- Peluang <i>Go International</i> -- Kesempatan kolaborasi dengan negara-negara ASEAN -- Ajang mendorong kualitas PR 	<ul style="list-style-type: none"> -- Ketatnya persaingan lapangan pekerjaan profesi PR -- Pesatnya perkembangan dunia digital

Pada era MEA ini profesi PR menjadi profesi yang amat kompleks karena perkembangan zaman yang mengikutinya, sehingga PR dituntut untuk selalu dapat beradaptasi dalam era ini. Ia menyebutkan bahwa *skill set* yang bertambah merupakan kemampuan beradaptasi dalam dunia digital, yaitu bagaimana PR dapat menjadi seorang *content creator* (pencipta konten). Hal ini dilihat seiring majunya perkembangan dunia digital saat ini. PR dituntut untuk mempunyai kemampuan bagaimana mendapatkan perhatian publik melalui konten-konten menarik yang diciptakannya dalam dunia media sosial. Tantangan yang dihadapi pun kerap

bermain dengan waktu. Saat ini seperti yang kita ketahui, sistem informasi sudah berjalan begitu cepat, semua dapat diakses *in a real time. It's rapid and unstoppable, that's why PR needs to be fully aware and capable (both in skill and ethics) to overcome this challenge.*

Selanjutnya, peneliti menemukan beberapa *skill* atau kemampuan yang juga harus dimiliki oleh PR dalam menghadapi MEA ini, diantaranya adalah: kemampuan untuk melakukan RACE (*Research, Action, Communication, Evaluation*) dan kemampuan PR untuk dapat memahami mengenai bisnis dan *financial*. Menurut Dian Anggraeni Umar, PR harus meningkatkan *skill* nya dalam melakukan riset PR. Beliau berkata bahwa banyak PR yang dalam pekerjaannya melewati tahapan-tahapan penting yang seharusnya dilakukan oleh PR tersebut, yaitu riset. Padahal beliau melihat justru tahapan riset dan evaluasi mempunyai peranan penting dalam setiap pelaksanaan programnya. Berkaca kepada kondisi diatas, hal-hal yang dilakukan PERHUMAS untuk meningkatkan profesionalisme khususnya dalam komponen *skill* atau kemampuan anggotanya, rutin dilakukan oleh organisasi profesi tersebut.

PERHUMAS sudah menyelenggarakan kurang lebih 100

program yang berupa: seminar (PERHUMAS Roadshow to Campus, Coffee Morning, Sharing Best Practice, Breakfast Forum), workshops, audiensi, konvensi nasional humas, internal gathering terhitung sejak PERHUMAS mulai *concern* terhadap adanya isu MEA di akhir tahun 2014 menjelang awal tahun 2015. Program-program tersebut dilakukan dengan tujuan agar anggotanya dapat siap bersaing menghadapi MEA. Setiap program-program yang dilakukan oleh PERHUMAS dapat dilihat di pemaparan hasil penelitian. PERHUMAS meyakini bahwa aktivitas yang selama ini dijalankan oleh PERHUMAS belum mencapai titik kepuasan para pengurusnya. BPP PERHUMAS melihat bahwa profesi PR akan terus berevolusi, oleh karena itu PERHUMAS juga tidak akan berhenti dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi profesi yang turut mengembangkan kemampuan anggotanya.

Rosady Ruslan (2004:52) menyebutkan secara umum salah satu ciri-ciri PR professional adalah memiliki kode etik yang merupakan standar moral bagi setiap profesi yang dituangkan secara formal, tertulis, dan normatif, dalam suatu bentuk aturan main dan perilaku ke dalam "kode etik," yang merupakan standar atau komitmen moral kode perilaku (*code of*

conduct) dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku *by profession* dan *by function* yang memberikan bimbingan, arahan, serta memberikan jaminan dan pedoman bagi profesi yang bersangkutan untuk tetap taat dan mematuhi kode etik tersebut. Sejalan dengan konsep yang disebutkan oleh Ruslan, peneliti menemukan fakta bahwa PERHUMAS juga mempersepsikan kode etik sebagai standar moral dan landasan etika dalam berprofesi agar dapat sukses berkompetisi dengan negara anggota ASEAN lainnya di era persaingan terbuka ini. Hal ini dituangkan melalui pernyataan Dian Anggraeni Umar, “kode etik itu penting karena itu menjadi landasan para praktisi untuk melakukan praktik kehumasan,”³ John Daniel Rembeth selaku Ketua bidang Keanggotaan dan Pelatihan PERHUMAS mengungkapkan hal yang sedikit berbeda dengan kedua narasumber diatas, ia berkata kode etik merupakan sebuah batasan yang kita ciptakan sendiri. Namun, ‘batasan diciptakan sendiri’ yang ia maksudkan disini mengarah kepada komitmen anggota untuk mengetahui apa yang boleh dan tidak untuk dilakukan sebagai praktisi PR. Hal ini masih sejalan dengan konsep yang diutarakan oleh Rosady Ruslan (2004:52); kode etik juga merupakan standard dan komitmen moral atau sebuah pedoman perilaku (*code of*

conduct) dalam melaksanakan tugasnya sebagai PR professional. Oleh karena itu, beliau menyatakan bahwa PR harus benar-benar mengerti bagaimana beretika sesuai dengan profesinya.

Melalui pendapat ketiga narasumber diatas, PERHUMAS mengartikan kode etik sebagai sebuah pedoman, landasan serta batasan dalam menjalankan profesi sebagai PR. PERHUMAS menganggap hal ini sangat penting untuk dimiliki segenap anggota PR di Indonesia. PERHUMAS juga melihat bahwa kode etik sebagai hal yang *critical* yang harus menjadi pegangan semua PR dalam bertindak atau berprilaku.

Peneliti menemukan fakta melalui hasil wawancara bersama dengan narasumber bahwa PERHUMAS memiliki kode etik tertulis sendiri, yaitu kode etik PERHUMAS Indonesia yang mengacu kepada kode etik International Public Relations Association (IPRA) dan Public Relations Society of America (PRSA). Dian Anggraeni Umar menyebutkan bahwa PERHUMAS selalu melihat dan memantau perubahan-perubahan kode etik yang *diupdate* oleh organisasi profesi internasional tersebut. Ia pun mengatakan bahwa PERHUMAS tengah *me-release* kode etik yang baru terkait UUD ITE (baru-baru ini dikeluarkan oleh pemerintah); yang relevan dengan situasi

dunia saat ini.

Rosady Ruslan (2004:52) juga menyebutkan bahwa kode etik adalah standar atau komitmen moral kode perilaku (*code of conduct*) dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku *by profession* dan *by function*. Melalui pengembangan konsep ini, peneliti menemukan fakta bahwa komitmen moral atau kode perilaku (*code of conduct*) yang disebutkan dalam kode etik menurut Rosady Ruslan diatas, diartikan oleh para narasumber; salah satunya sebagai komitmen untuk dapat mensinergikan diri PR dengan publiknya dan tidak semata-mata hanya mementingkan kepentingan perusahaan. Di samping itu, seorang PR profesional harus mampu bekerja atau bertindak melalui pertimbangan yang matang dan benar. Seorang humas profesional dapat membedakan secara etis mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak dapat dilakukannya sesuai dengan pedoman kode etik profesi yang disandang oleh yang bersangkutan.

Melalui pemahaman etika profesi tersebut, menurut Agung Laksamana, etika PR erat hubungannya dengan kepercayaan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ruslan (2004:54), bahwa PR harus mampu bekerja atau bertindak melalui pertimbangan yang

matang dan benar. Agung Laksamana melihat ketika praktisi profesional memiliki etika PR, hal tersebut adalah usaha membangun kepercayaan, sehingga PR harus melakukan pertimbangan yang matang dan benar. Pertimbangan yang benar dan matang tersebut salah satunya dapat peneliti lihat melalui formula kepercayaan. Agung Laksamana melihat bahwa etika PR dibutuhkan untuk membangun kepercayaan kepada publiknya. Sehingga, beliau memaparkan formula dalam meningkatkan kepercayaan, yaitu *low trust – high cost – low speed* dan *high trust – low cost – high speed*. Dalam hal ini, terlihat acuan utamanya adalah *trust* yang hanya bisa diraih apabila PR memiliki dan menjalani etika PR. Berikut kutipan wawancaranya:

“Etika PR itu penting untuk membangun kepercayaan. Rumusnya seperti ini, low trust – high cost – low speed dan high trust – low cost – high speed. Di media saat ini banyak fake news, damaged has been done. Karena lanskap media saat ini telah berubah di mana media tidak lagi ingin menjadi yang paling terpercaya tapi ingin menjadi terpopuler. So, we have to be ready.”⁶

Menurut Rosady Ruslan, kode etik memang memberikan jaminan dan pedoman bagi PR yang bersangkutan untuk tetap taat dan mematuhi kode etik tersebut, namun pada faktanya belum ada

tindakan yang secara konkrit dilakukan apabila menyalahi kode etik praktik PR di Indonesia. Peneliti menemukan fakta bahwa, walaupun PERHUMAS tidak mempunyai program khusus untuk meningkatkan kesadaran kode etik anggotanya, namun PERHUMAS yakin bahwa anggota memahami betul perihal landasan berperilaku sebagai humas tersebut. Palsnya, narasumber menceritakan bahwa sejauh ini, anggota PERHUMAS masih berada di koridor yang tepat. Agung Laksamana memaparkan bahwa ia belum menerima adanya *complain* sampai sejauh ini. Beliau berkata, “saat ini belum ada *complain*. *I’m sure they were okay*.” Tutur Ketua PERHUMAS Indonesia. Dian Anggraeni Umar dalam wawancaranya juga berkata bahwa ia yakin anggota PERHUMAS paham betul mengenai kesadaran kode etik, sehingga beliau yakin anggota PERHUMAS berada di koridor yang tepat.

Menurut Rosady Ruslan (2004:52) komponen ketiga yang harus dimiliki oleh PR profesional adalah tanggung jawab profesi (*responsibility*) dan integritas pribadi (*integrity*) yang tinggi baik terhadap dirinya sebagai penyandang profesi PR, maupun terhadap publik, klien, pimpinan, organisasi perusahaan, penggunaan media umum/massa hingga

menjaga martabat serta nama baik bangsa dan negaranya. Senada dengan konsep yang dikemukakan oleh Rosady Ruslan (2004:52) mengenai integritas dan tanggung jawab, PERHUMAS menyatakan bahwa komponen ini menjadi hal yang amat penting untuk dimiliki oleh PR. PERHUMAS melihat, kemampuan PR atau anggotanya untuk memiliki integritas dan tanggung jawab terhadap publik, klien, pimpinan, organisasi perusahaan, penggunaan media umum/massa hingga menjaga martabat serta kepada bangsa Indonesia merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh PR dalam berprofesi.

PERHUMAS memaknai tanggung jawab profesi dan integritas pribadi, sebagai hal yang tidak jauh berbeda dengan komponen yang sebelumnya di bahas pada bab ini, yaitu kode etik PR. Para narasumber menganggap bahwa integritas pribadi dan tanggung jawab pribadi merupakan buah yang dihasilkan apabila PR mengerti betul serta paham secara *knowledge* fungsi dan peran seorang humas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Hal ini sejalan dengan

bagaimana PERHUMAS memaknai tanggung jawab profesi dan integritas pribadi. PERHUMAS melihat tanggung jawab profesi dan integritas pribadi sebagai nilai diri atau *personal values* yang harus dimiliki oleh anggota dalam menjalankan pekerjaannya. Artinya, para praktisi harus dibentengi dengan sebuah nilai yang dapat menjaga dia dalam berpraktek itu sendiri.³ Berkaca kepada formula yang dipaparkan oleh Agung Laksamana: *your action plus what people say about you equals reputation* atau tindakan kita ditambah apa yang dikatakan oleh orang lain menghasilkan suatu reputasi. Dalam hal ini, peneliti menemukan fakta bahwa integritas dan tanggung jawab profesi (tindakan) berujung kepada reputasi. Itu berarti, poin ini sangat perlu ditingkatkan agar PR dapat menghadapi MEA. Era persaingan global saat ini, resiko reputasi (*reputation risk*) menjadi semakin rentan. Saat ini, mencari reputasi atau *track record* seseorang dengan mudah didapatkan dengan *one Google away* atau hanya sebatas mengetiknya dalam *search engine Google*. Namun, walaupun PERHUMAS tidak mempunyai program khusus dalam aspek integritas dan tanggung jawab; PERHUMAS dengan yakin mengungkapkan bahwa PR yang tergabung dalam keanggotaan

PERHUMAS memiliki *awareness* yang tinggi akan hal tersebut.

Rosady Ruslan (2004:52) menjelaskan ciri-ciri PR profesional yang ke empat ialah memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat dengan penuh dedikasi profesi luhur yang disandangnya. Dalam mengambil keputusan, meletakkan kepentingan pribadinya demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negaranya (*ambeg parama artha*). Memiliki jiwa pengabdian dan semangat dedikasi tinggi tanpa pamrih dalam memberikan pelayanan jasa keahlian dan bantuan kepada pihak lain yang memang membutuhkannya. Sejalan dengan konsep yang diungkapkan oleh Rosady Ruslan (2004:52), PERHUMAS melihat memiliki jiwa pengabdian juga merupakan hal yang tak kalah penting untuk menjadi seorang PR profesional. Dalam konsep tersebut dikatakan bahwa dalam mengambil keputusan, meletakkan kepentingan pribadinya demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. PERHUMAS melihat bahwa anggotanya memiliki rasa jiwa pengabdian yang cukup tinggi terhadap profesi PR itu sendiri. Sejalan dengan konsep yang diungkapkan oleh Rosady Ruslan (2004:52), PERHUMAS melihat memiliki jiwa pengabdian juga merupakan hal yang tak kalah penting untuk menjadi seorang

PR profesional. Dalam konsep tersebut dikatakan bahwa dalam mengambil keputusan, meletakkan kepentingan pribadinya demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. PERHUMAS melihat bahwa anggotanya memiliki rasa jiwa pengabdian yang cukup tinggi terhadap profesi PR itu sendiri.

Menurut Rosady Ruslan (2004:52) ciri-ciri PR profesional selanjutnya adalah otonomisasi organisasi profesional, yaitu memiliki kemampuan untuk mengelola (manajemen) organisasi humas yang mempunyai kemampuan dalam perencanaan program kerja jelas, strategis, mandiri dan tidak tergantung pihak lain serta sekaligus dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, dapat dipercaya dalam menjalankan operasional, peran, dan fungsinya. Di samping itu, memiliki standard dan etos kerja profesional yang tinggi. Berkaca kepada konsep yang diutarakan oleh Rosady Ruslan (2004:52) PERHUMAS melihat bahwa otonomisasi organisasi harus dimiliki oleh PR dalam menghadapi era MEA ini. PR perlu memiliki kemampuan untuk mengelola (manajemen) organisasi humas atau perusahaan yang digelutinya. PERHUMAS menganggap hal ini tidak jauh berbeda dengan komponen kemampuan atau *skill* yang harus dimiliki oleh PR sebagai salah satu ciri-ciri PR

profesional. Dalam konsep ini disebutkan kemampuan atau *skill* yang harus dimiliki adalah kemampuan dalam perencanaan program kerja jelas, strategis, mandiri, dan tidak tergantung pihak lain serta dapat bekerja sama dengan pihak yang bersangkutan.

Menurut Cutlip, Center and Broom (2011: 55) otonomi merupakan kebebasan untuk memutuskan dan bertindak harus dilakukan secara bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dimiliki oleh PERHUMAS. PERHUMAS melihat bahwa PR harus memiliki kebebasan dalam melakukan pekerjaannya. Kebebasan disini juga mengarah kepada konsep yang disebutkan oleh Rosady Ruslan bahwa PR harus bersifat *independent* dan tidak bergantung kepada pihak lain. Otonomisasi organisasi merupakan *skill* yang harus dimiliki oleh PR dalam menghadapi MEA ini. Berkaca kepada konsep yang diutarakan oleh Ruslan (2004:52) aktivitas PERHUMAS dalam meningkatkan onomisasi organisasi profesional merupakan aspek ke-5 yang menjadi ciri-ciri PR professional. Hal ini, sedikit berbeda dari poin-poin diatas. Kemampuan untuk mengelola (manajemen) organisasi humas yang mempunyai kemampuan dalam perencanaan program kerja jelas, strategis, mandiri dan tidak tergantung pihak lain

serta sekaligus dapat bekerja sama dengan pihak- pihak terkait, dapat dipercaya dalam menjalankan operasional, peran, dan fungsinya.

Menurut Rosady Ruslan (2004:53) menjadi anggota salah satu organisasi profesi sebagai wadah untuk menjaga eksistensi, mempertahankan kehormatan, dan menertibkan perilaku standar profesi sebagai tolak ukur itu agar tidak dilanggar. Selain organisasi profesi sebagai tempat berkumpul, fungsi lainnya adalah sebagai wacana komunikasi untuk saling menukar informasi, pengetahuan, dan membangun rasa solidaritas sesama rekan anggota. Sejalan dengan konsep yang diungkapkan oleh Rosady Ruslan (2004:53), PERHUMAS melihat bahwa penting sekali bagi PR untuk tergabung di dalam keanggotaan organisasi profesi. PERHUMAS juga melihat bahwa dengan tergabungnya PR dalam keanggotaan PERHUMAS maka hal itu dapat meningkatkan eksistensi PR tersebut – PR akan lebih diakui dan terjamin mutu serta kualitasnya diantara para pesaingnya; khususnya dalam persaingan pasar era terbuka saat ini. Berkaca kepada konsep yang diungkapkan oleh Rosady Ruslan (2004:53), dikatakan bahwa organisasi profesi juga merupakan tempat berkumpul yang berfungsi sebagai wacana komunikasi untuk saling menukar

informasi, pengetahuan, dan membangun rasa solidaritas sesama rekan anggota. PERHUMAS menyebutkan bahwa banyak keuntungan yang didapatkan oleh PR apabila tergabung dalam organisasi ini. Anggia menjelaskan bahwa anggota mendapatkan diskon dalam setiap program-program yang diselenggarakan oleh PERHUMAS. Selain dapat menambah ilmu, *networking*, bertukar *experience* dengan praktisi humas yang sudah berpengalaman, anggota juga dapat mengakses langsung *topkarir.com* yang merupakan bentuk kerjasama PERHUMAS dengan sebuah organisasi pencarian karier.

Sampai sejauh ini, jumlah keanggotaan PERHUMAS Indonesia berjumlah 800-1000 orang. Jumlah tepatnya sampai saat ini belum dapat dipastikan oleh pihak PERHUMAS, pasalnya terdapat beberapa anggota yang belum memperpanjang masa keanggotaannya. Melihat jumlah keanggotaan PERHUMAS saat ini, PERHUMAS menyebutkan bahwa upaya-upaya meningkatkan jumlah keanggotaan masih terus dilakukan. Ketua bidang Keanggotaan dan Pelatihan John Daniel Rembeth merupakan pihak yang membawahi program *recruitment* anggota baru di PERHUMAS tersebut. Beliau

menyatakan bahwa setiap program-program yang diselenggarakan oleh PERHUMAS merupakan upaya sembari *me-recruit* anggota baru. Beliau mengatakan bahwa PERHUMAS mengingini *market* organisasi ini semakin luas.

Agung Laksamana berkata bahwa banyak hal yang masih harus terus di *improve* dalam aktivitas PERHUMAS untuk meningkatkan kuantitas anggotanya, ia menyebutkan bahwa jika program-program yang dilakukan oleh PERHUMAS dapat menjawab tantangan yang di hadapai PERHUMAS saat ini khususnya tantangan MEA, maka secara otomatis banyak pula PR-PR yang ingin tergabung di dalam keanggotaan PERHUMAS Indonesia. Sehingga ia mengatakan bahwa titik beratnya adalah pada program-program yang berusaha untuk ditawarkan kepada PR di Indonesia khususnya di Jakarta, agar PERHUMAS dapat meningkatkan minat masyarakat untuk tergabung dalam organisasi profesi ini.

SIMPULAN

1. PERHUMAS sebagai organisasi profesi telah menjalankan aktivitas dalam meningkatkan *skill* atau kemampuan anggotanya menghadapi MEA. Aktivitas yang

dilakukan PERHUMAS dalam meningkatkan *skill* atau kemampuan pada saat sebelum dan sesudah diadakannya MEA, antara lain; mengadakan seminar (PERHUMAS Roadshow To Campus, PERHUMAS Coffee Morning, PERHUMAS Breakfast Forum, PERHUMAS Sharing Best Parctice), *workshops*, Konvensi Nasional Humas (KNH), Audiensi, *Internal Gathering* (Rapat Pleno PERHUMAS, Ngabuburit Bersama, etc), Sertifikasi PR, dan Akreditasi PR. Peneliti melihat aktivitas yang dilakukan oleh PERHUMAS belum dapat sepenuhnya merubah keadaan kesiapan PR dalam menghadapi MEA. Bila ditinjau dari aspek *skill* atau kemampuan, peningkatan profesionalisme PR menuntut kesamaan pandangan dan kerjasama bahu-membahu tidak hanya organisasi profesi PERHUMAS, namun pandangan pemerintah, pengusaha, dan segenap pemangku kepentingan lain pun harus turut bekerjasama agar kemampuan dan kualitas PR semakin mumpuni untuk dapat bersaing dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya.

2. PERHUMAS sebagai organisasi profesi telah menjalankan aktivitas dalam meningkatkan kesadaran kode etik anggotanya menghadapi MEA. Namun, PERHUMAS memang tidak mempunyai program khusus dalam upaya peningkatan kesadaran kode etik PR. Dalam upaya meningkatkan kesadaran kode etik, PERHUMAS melakukan pengembangan-pengembangan di dalam program-program pelatihan PERHUMAS, sehingga pembahasan mengenai kode etik hanya disinggung lewat program-program yang sudah ada, melalui penguatan dan *sharing* internal yang mereka lakukan, sosialisasi kepada seluruh anggota bahwa kode etik dapat dilihat di *website* PERHUMAS, serta PERHUMAS meyakinkan awalnya setiap calon anggota yang akan mendaftar menjadi anggota PERHUMAS akan terlebih dahulu diberikan buku pedoman yang berisikan mengenai kode etik yang harus dipatuhi oleh calon anggota tersebut. Bila ditinjau dari sisi kode etik; PERHUMAS yakin bahwa anggotanya siap secara *attitude* atau etika perilaku untuk bersaing dalam pasar persaingan terbuka ini.
3. PERHUMAS melihat bahwa komponen ini tidak jauh berbeda dengan komponen sebelumnya, yaitu kode etik PR. PERHUMAS melihat bahwa integritas diri dan tanggung jawab pribadi merupakan buah dari pengetahuan yang benar akan ilmu ke-PR-an khususnya pengetahuan dalam hal berperilaku. Dalam hal ini, PERHUMAS tidak memiliki aktivitas khusus untuk meningkatkan integritas dan tanggung jawab anggotanya. PERHUMAS menyebutkan tidak ada program yang dibentuk secara khusus untuk meningkatkan integritas dan tanggung jawab anggota. Namun, dalam setiap program-program seminar maupun pelatihan atau internal yang dilakukan, PERHUMAS mengembangkan poin ini di dalam setiap pembahasannya.
4. Sama halnya dengan dua poin diatas, PERHUMAS juga memaknai jiwa pengabdian sebagai bagian dari kode etik dan integritas PR. Dalam hal ini, jiwa pengabdian timbul juga karena integritas atau *attitude* yang diterapkan. PERHUMAS juga

tidak mempunyai program khusus yang membahas tentang jiwa pengabdian anggota. Sama halnya dengan kedua poin yang tergolong *attitude* diatas, PERHUMAS hanya melakukan pengembangan-pengembangan lewat program-program pelatihan yang sudah di canangkan.

5. Dalam komponen ini, PERHUMAS melihat bahwa otonomisasi organisasi profesional tidak jauh berbeda dengan peningkatan *skill* atau kemampuan. PERHUMAS melihat bahwa upaya agar anggota mempunyai kemampuan manajemen organisasi serta kemampuan PR untuk dapat bekerja secara strategis, jelas dan mandiri dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan sama halnya seperti komponen peningkatan *skill* atau kemampuan.
6. Aktivitas PERHUMAS dalam meningkatkan jumlah keanggotaan dilakukan beriringan pada saat memberikan pelatihan atau seminar ke kampus-kampus (PERHUMAS Roadshow to Campus) atau melakukan seminar terbuka seperti (PERHUMAS Coffee Morning, PERHUMAS Sharing Best Parctice), *workshops*,

dan Konvensi Nasional Humas (KNH). Tujuan PERHUMAS selain untuk mendukung serta meningkatkan profesionalisme PR adalah untuk meningkatkan kuantitas keanggotaan PERHUMAS (*open recruitment*).

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN. (n.d.). *Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)*. Jakarta ASEAN Secretariat. Diakses melalui <http://www.asean.org/news/item/declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii>
- ASEAN. (n.d.). *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*. Jakarta: ASEAN Secretariat. diakses melalui <http://www.asean.org/news/item/cebu-declaration-on-the-acceleration-of-the-establishment-of-an-asean-community-by-2015>
- Badan Pusat Statistik. 2014. Diakses melalui <https://bps.go.id/Subjek/view/id/28#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek>
- Budiantoro. 2016. *Komunitas Ekonomi ASEAN Menjadi Tantangan bagi PublicRelations*. Diakses melalui <http://atjehpost.co/berita2/read/Komunitas-Ekonomi-ASEAN-Jadi-Tantangan-Public-Relation-Indonesia-636>
- Chairil /Yuhardi /Hardyanto/Erwin/ Palma. 2014. *Peluang dan Tantangan Indonesia Pada ASEAN Economic Community 2015*. Diakses dari http://www.setneg.go.id/index.php?lang=en&option=com_content&task=view

&id=7911

Cutlip, Scott. M., A. H. Center, dan G. M. Broom. 2011. *Effective Public Relations*. Jakarta: Kencana.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2015. Diakses melalui [http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Ekonomi-ASEAN-\(MEA\).aspx](http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Ekonomi-ASEAN-(MEA).aspx)

Komalasari, Yetty. 2015. *Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015*. Jurnal Bhinneka Tunggal Ika. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. PERHUMAS. (n.d.). *Sejarah PERHUMAS Indonesia*. Diakses melalui <http://www.perhumas.or.id/>

Romualdus, Sandy. 2016. *Tantangan Kita adalah Bahan Baku SDM*. Diakses melalui <http://indonesiasatu.co/detail/tantangan-kita-adalah-bahan-baku-sdm>

Ruslan, Rosady. 2004. *Etika Kehumasan Konsepsi & Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta